

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT UNIT KERJA  
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURHAYAT,S.STP**  
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumedang, 31 Januari 2024

Pihak kedua  
Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si

Pihak Pertama  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri  
dan Organisasi Kemasyarakatan

NURHAYAT,S.STP

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA UNIT KERJA  
BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</b>					
No	Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Aktivitas Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>285.000.000,00-</b>
		Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 orang	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	135.000.000,00-
		Jumlah orang	50 orang	Dalam rangka Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	135.000.000,00-
		<b>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</b>	<b>81 ormas</b>	<b>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</b>	<b>150.000.000,00-</b>
		Jumlah Ormas	6 Ormas	Dalam Rangka Fasilitasi Ormas	64.035.400,00-
		Jumlah kegiatan	3 Kegiatan	Dalam Rangka Pengawasan Ormas	36.573.600,00-
		Jumlah Ormas	75 Ormas	Dalam Rangka Safari Ormas	49.391.000,00-
2		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN</b>	<b>Jumlah laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan</b>	<b>6 Laporan</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang</b>

PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintaha, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	54.364.667.100,00-
	Jumlah Parpol	12 parpol	Dalam rangka Kemitraan Parpol	45.175.000,-
	Jumlah orang	10 orang	Dalam rangka Monitoring Keamanan Pemilu dan Pilkada 2024	65.000.000,-
	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Hibah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumedang	8.000.000.000,-
	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Hibah Komisi Pemilihan Umum Sumedang	44.000.000.000,-
	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Hibah Berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.854.492.000,-
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	100,000,000.00

Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	Dalam rangka Gebyar Deklarasi Damai dan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024	70.941.300,-
Jumlah Parpol	8 parpol	Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pengelola Bantuan Keuangan Parpol	29.058.800,-
<b>Jumlah hasil monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</b>	<b>300.000.000,-</b>
Jumlah Orang	3.000 orang	Dalam rangka pembayaran BPJ Ketenagakerjaan Panitia Adhoc Pemilu	300.000.000,-
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp. 54.649.667.100,00-</b>

Sumedang, 31 Januari 2024

Pihak kedua  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sumedang

Drs. H. ASEP TATANG SUJANA, M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri  
dan Organisasi Kemasyarakatan

NURHAYAT, S.STP